



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI  
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI,  
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI,  
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI, DAN  
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (OIKN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 10 Juni 2024
Waktu Rapat	: Pukul 12.40 s.d. 14.17 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (Wakil Ketua/F-PDIP)
Acara Rapat	: Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 26 dari 49 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (Wakil Ketua/F-PDIP) 2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)  1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 7 orang Anggota dari 11 Anggota: 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H. 2. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. 3. Riyanta 4. H. Heru Sudjatmoko

5. Drs Cornelis, M.H.
6. Ir. Hugua
  
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
  1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
  2. Drs. H. Riswan Tony D. K.
  3. A. A. Baguas Adhi Mahendra Putra, M. H.,  
M. Kn.
  
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
  1. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si.,  
M.Sc.
  2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
  3. Drs. Difriadi
  
4. FRAKSI PARTAI NASDEM  
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
  1. Aminurokhman, S.E., M.M.
  2. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.
  3. Kamran Mochtar Podomi, S.T.
  
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
  
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
2 orang Anggota dari 5 Anggota:
  1. Reza Oktoberia, S.H.
  2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
  3. H. Mohammad Muraz, M.M.
  
7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
  
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
  2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
  3. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
  
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN  
2 orang Anggota dari 2 Anggota:
  1. Dra. Hj. Munawaroh

Anggota yang Izin/Sakit:

1. Paryono (F-PDIP);

2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt. (F-PKS).

**B. UNDANGAN**

1. Menteri Dalam Negeri RI  
(Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.);
2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI  
(Heddy Lugito);
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)  
(Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Boleh kita mulai? Ini Otorita IKN ada enggak?

Pakai halo-halo Bu, kedengaran.

**OTORITA IKN:**

Izin Bapak Pimpinan, masih dalam perjalanan, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Iya?

**OTORITA IKN:**

Dalam perjalanan kemari.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Mestinya jam berapa ini anggaran?

.....:

Iya Pak?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Anggaran mestinya jam berapa ini?

.....:

Mestinya sudah mulai.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Jam berapa?

.....:

Jam 11.00.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Oh ini dari IKN ya? Oh *sory-sory*. Amin kan saja Pak kalau mau jadi IKN.

Coba ditelepon Bu, berapa detik lagi IKN ini?

Loh ini kan Wamen. Wamen ini.

.....:

Wakil dari IKN.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Wamen ini.

.....:

Wakil dari IKN.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Wamen ini.

.....:

Ada suratnya Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sudah pindah dari ATR BPN, Pak Wamen?

Boelh kita mulai ya. Pak Menteri, kita mulai.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Kepala BNPP beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP beserta jajarannya,  
Saudara Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,  
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan  
Hadirin sekalian,**

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena-Nya, hanya atas perkenan-Nya, kita dapat menghadiri rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua DKPP dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam keadaan sehat *walafiat* untuk melaksanakan tugas konstitusional di bidang anggaran pada hari ini.

Sesuai laporan sekretariat, rapat pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 49 Anggota dari 9 Fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Maka, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.40 WIB)**

**Bapak/Ibu sekalian,**

Setelah ini, kita akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri. Usul dari meja Pimpinan kepada kita semua, setelah kita selesai menyangkut anggaran, kita bisa lanjutkan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

Apakah setuju Bapak/Ibu Anggota Komisi II? Setuju ya? Saudara Menteri setuju? Supaya cepat nanti pas makan siang kita selesai, Pak. Kalau enggak banyak pertanyaan dari Anggota.

**(RAPAT: SETUJU)**

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran, DPR RI menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKAKL dan RPKPL tahun 2025, yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada Badan Anggaran Dewan Program Rakyat Republik Indonesia.

Oleh karena itu, kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara Rapat Kerja, Raka, Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, yaitu:

1. Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025;
2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; dan
3. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024.

Kita mulai waktu di ruangan ini jam 12.40 menit. Rapat Anggaran kita akhiri jam 13.00 karena ini kan pembicaraan pendahuluan untuk anggaran, ya. K/L menyampaikan pagu indikatif. Jadi, kita di Komisi II hanya mendengarkan saja. Dan walaupun nanti ada masukan dari Komisi II, itu menjadi bahan dari para mitra untuk bisa nanti dijawab dalam pembahasan pagu anggaran, ya. Untuk pagu sementara melanjutkan pertemuan pada hari ini.

Setuju ya? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Jadi, rapat kita akhiri pukul satu. Saudara Menteri ya, Kepala BPIP, Ketua DKPP, dan Kepala Otorita IKN.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada saudara-saudara menyampaikan penyelesaian. Yang pertama dari Saudara Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, BNPP. Selanjutnya, DKPP dan diakhiri dari Plt. OIKN. Dilanjutkan dengan masukan-masukan dari Komisi II.

Silakan yang pertama dari Saudara Menteri.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

*Walaikumussalam.*

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.):**

Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo budhaya,*  
Salam Kebajikan,

**Yang kami muliakan Pimpinan,**

**Bapak Wakil Ketua Komisi II DPR Bapak Dr. Junimart Girsang, kemudian Bapak Saan Mustofa, Bapak Syamsurizal, serta Yang saya muliakan Anggota DPR RI Komisi II yang hadir baik secara langsung maupun virtual,**

Juga hadir di sini,

**Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Heddy Lugito, serta Anggota, Bapak J. Kristiadi, dan juga Sekretaris Dewan Kehormatan, Pak Dr. David Yama, dan juga Counterpart saya, yang dalam konteks inilah sebagai mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pak Raja Juli Antoni, Ph.D, Rekan-rekan pendamping dari Kementerian/Lembaga yang hadir,**

Berkenaan dengan surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 20 Mei, undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat. Yang intinya adalah dari Kemendagri dan kebetulan DKPP adalah salah satu komponen di Kemendagri dan *ex-officio*. Kami juga adalah sebagai Kepala BNPP akan menyampaikan tentang, tentang agenda-agenda yang berhubungan dengan Kemendagri, BNPP dan tentunya DKPP juga secara umum.

Ada beberapa enam hal yang diminta untuk dijelaskan, yaitu:

1. Evaluasi pelaksanaan anggaran Kemendagri tahun 2023; kemudian
2. Evaluasi pelaksanaan anggaran Kemendagri 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
3. RKP termasuk pagu indikatif tahun Anggaran 2025 untuk Kemendagri; dan juga
4. Evaluasi BNPP 2023 sampai dengan Mei 2024; serta
5. Pagu indikatif BNPP 2025.

Kami mohon izin lanjutkan.

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II, Bapak/Ibu sekalian,**

Yang pertama mengenai masalah evaluasi pelaksanaan anggaran 2023. Ada sejumlah prestasi penghargaan capaian kinerja Kemendagri 2023:

1. Mulai dari opini "WTP" atas laporan keuangan, sebanyak sembilan kali berturut-turut, baik kepada Kemendagri maupun kepada BNPP; kemudian
2. Prestasi peringkat satu nilai kinerja anggaran kategori pagu sedang, tiga tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan;
3. Penghargaan Kemendagri atas keterbukaan informasi publik dengan badan publik kategori informatif yang diterima di Istana Wakil Presiden RI; kemudian juga
4. Indeks kepatuhan terhadap standar layanan publik 90,47 yang termasuk zona hijau serta termasuk top 4 produk layanan administrasi oleh Ombudsman RI; juga

5. Penghargaan dari Kementerian Keuangan tentang Anugerah Reka, Reksa Banda kategori pemohon lelang non-eksekusi wajib; kemudian
6. Dari Kemenpan-RB, penghargaan atas dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik; dan
7. Dari Kementerian PPA, Anugerah Parahita Ekapraya kategori utama; dan juga
8. Dari BPKP yaitu tingkat maturitas SPIP Kemendagri dengan kategori terdefinisi.

Itulah sebagian dari prestasi dan penghargaan capaian kinerja. Kami tidak bacakan seluruhnya karena waktu.

Kemudian, kami lanjut kepada pagu dan realisasi 2023. Untuk pagu tahun 2023 adalah sebesar 2,98 triliun dan kemudian di akhir tahun 2023 terdapat penambahan pagu Kemendagri 1,42 triliun. Namun, ada pengurangan 19,1 Miliar yang tersebar di eselon I. Sehingga, total pagu 2023 menjadi sebesar 4,38 triliun.

Adapun alokasinya dari 4,38 triliun itulah:

- Kantor pusat sebesar 3,93 triliun; dan
- Kantor daerah 393 miliar.

Menurut jenis belanja:

- Belanja pegawai 828 miliar;
- Belanja barang 3,31 triliun;
- Belanja modal 245 miliar lebih.

Kemudian realisasinya dari total pagu anggaran 4,38 triliun untuk tahun 2023 realisasinya adalah 97,25% atau 4,26 triliun. Dan ini adalah, kalau dihitung angka rata-rata nasional 96,41%, angka 97,25 adalah di atas nasional peringkat ke-12 dari 21 kementerian/lembaga dan pagu sedang dan peringkat ke-52 dari 84 kementerian/lembaga.

Rincian realisasinya, saya kira, sebagaimana yang ada di dalam data *slide* yang dipaparkan yaitu 97,25%.

Kemudian, capaian kegiatan prioritas Kemendagri tahun 2023 cukup banyak, kami kira. Di antaranya:

1. Penyaluran bantuan keuangan partai politik 126 miliar kepada 9 partai; kemudian
2. Literasi politik masyarakat pendidikan politik 5000 orang; kemudian juga
3. Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedomaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024;
4. Penerbitan instruksi Mendagri tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
5. Terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Camat dalam mendukung tahapan Pemilu Pilkada 2024; kemudian



6. Terselenggaranya Anggaran Pendapatan Belanja *Award* dan Rakornas Keuangan Daerah, yang memberikan *reward* kepada Provinsi Kabupaten Indonesia;
7. Terselenggaranya Pilkades 1600 desa dengan aman dan bebas sengketa; juga
8. Percepatan pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
9. Pelatihan 121.700 aparatur desa pengurus kelembagaan desa di 33 provinsi dan meliputi provinsi/kabupaten/kota 140 daerah;
10. Perekaman KTP elektronik 200 juta jiwa lebih atau 97,58%. Juga, penerbitan dokumen-dokumen kependudukan sebagaimana juga terdapat dalam *slide*;

Kemudian,

11. Pembinaan produk hukum daerah, Perda-Perda, ini yang jumlahnya ada 17.317 peraturan terdampak. Ini meliputi:
  - 112 Perda Provinsi;
  - 260 Peraturan Gubernur; dan juga
  - di tingkat Kabupaten/Kota 1.288 Perda; dan
  - 800 Peraturan Bupati Walikota.
12. Rekrutmen Majelis Rakyat Papua di enam provinsi di wilayah Papua; kemudian juga
13. Pengembangan kompetensi pejabat strategis DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 465 orang dan DPD tingkat Kabupaten/Kota 42.118 orang. Yang melibatkan juga 55 universitas, asosiasi, dan 12 partai politik; kemudian juga
14. Ada penerapan aplikasi SIPD; kemudian juga
15. Di bidang Puspen, pemberitaan 206 ribu lebih dan opini positif 94%; kemudian
16. Pemantauan inflasi yang salah satu menjadi arahan dari Bapak Presiden kepada Kemendagri dan sampai dengan bulan Desember terjaga di angka, 2023, 2,61%;
17. IPDN juga melaksanakan kegiatan seminar-seminar stadium *general* yang melibatkan sejumlah pejabat, baik pusat maupun daerah, termasuk juga non-pemerintah untuk masukan bagi para praja dan *civitas akademika*;
18. Inovasi daerah juga dilakukan *reward and punishment* dengan total inovasi sebanyak 28.000 lebih. Penghargaan Inovatif *Government Award*.

Selanjutnya untuk tahun 2024 sebagai evaluasi, ada juga jumlah prestasi penghargaan capaian di antaranya adalah:

- Kenaikan reformasi birokrasi, sudah naik ke predikat "A" atau "Memuaskan" dari Kemenpan-RB; kemudian juga
- Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan juga naik ke predikat "Sangat Baik" atau "BB" dari Kemenpan-RB; kemudian juga
- Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, digitalisasi dan penggunaan data kependudukan yang

- disinergikan dengan sistem di pertanahan juga mendapatkan penghargaan; kemudian juga
- Di bidang kearsipan juga mendapatkan penghargaan dari Badan Arsip Nasional; selain itu juga
  - Penghargaan yang diperoleh dari kearsipan dengan kategori "Sangat Memuaskan".

Di tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, pagu Kemendagri sesuai dengan surat Menteri Keuangan itu adalah 3,34 triliun. Dan dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Mei, terdapat penambahan Pagu anggaran sebesar 612 miliar yang tersebar di sejumlah eselon. Sehingga, totalnya menjadi 3,96 triliun dari 3,34 triliun.

Kemudian dari rincian pagu tersebut:

- Kantor pusat adalah 3,57 triliun;
- Daerah 314 miliar; dan
- Dana dekonsentrasi 72 miliar.

Sebagian besar dari rupiah murni 3,24 triliun ada, ada pinjaman luar negeri sebanyak 658 miliar. Juga, ada PNPB sebanyak 48,35 miliar dan ada hibah langsung dalam negeri 3,6 miliar.

Realisasi sampai dengan 31 Mei 2024 adalah 33,83% atau sebanyak 1,33 triliun. Rinciannya adalah sebagaimana di dalam *slide* per komponen ini:

- Yang tertinggi adalah Polpum karena ini langsung dialokasikan kepada, untuk part- sumba, dana kepada partai politik. Kemudian, 60%; kemudian juga
- 47,3% untuk Pemdes;
- IPDN 41%.

Rata-rata nasional 34,24%. Jadi, ini agak sedikit di bawah nasional.

Tapi, memang yang Dukcapil, yang terendah ini, nanti ada program untuk penguatan infrastruktur. Itu otomatis kita harus selesaikan kontraknya dulu, lelangnya dulu, dan kemudian nanti akan dieksekusi. Sehingga, akan terjadi percepatan realisasi belanja. Dan itu akan mempengaruhi, ketika Dukcapil, kemudian Adwil, Bangda naik. Maka, kami yakin angkanya nanti akan realisasinya di atas nasional.

Capaian kegiatan prioritas Kemendagri tahun sampai dengan 31 Mei 2024, ada sejumlah capaian telah dilakukan. Mulai dari:

1. Asistensi dan supervisi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) agar lebih mantap lagi di 38 provinsi termasuk 4 DOB dan 508 kabupaten/kota;
2. Evaluasi kinerja pejabat kepala daerah ada dua, 231. Ini yang dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri;
3. Pemantauan inflasi, sekali lagi, menjadi tugas utama, salah satu tugas tambahan, dan sampai dengan bulan April terjaga di angka 3%;

Tapi, data terakhir tadi pagi kami memimpin rapat inflasi nasional, kemajuan yaitu penurunan inflasi di angka 2,84% *year-on-year*. Dan *month to month*-nya itu terjadi devaluasi yaitu minus -0,33%. Yang artinya bahwa dari segi kenaikan harga barang dan jasa terjaga, sesuai target pemerintah, yaitu 2,5% *plus-minus*. *Range* antara 1,5% sampai 3,5%. Saat ini, di angka 2,84%.

Kemudian, tadi.

4. Penyaluran bantuan keuangan partai politik 94,78 miliar kepada 9 partai telah dilaksanakan;
5. Perekaman KTP elektronik 201 juta lebih atau 96,66%. Termasuk, dokumen-dokumen kependudukan yang rata-rata mencapai di angka 98%. Kemudian juga, Kartu Identitas Anak yang mencapai 52,70%;
6. Kami pun sudah memberikan DP4 untuk Pilkada, daftar pemilih potensial yang kami sudah serahkan pada bulan lalu kepada KPU; kemudian juga
7. Pengembangan kompetensi, terutama Badan Pengembangan SDM 599 orang; dan
8. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 6.835 orang;
9. Pembuatan RPJPD 2025-2045 juga telah dilakukan penetapan, pembuatan penetapan program penyusunannya. Ini sudah disosialisasikan untuk 20 tahun ke depan;
10. Rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat daerah yang melibatkan 38 provinsi juga telah dilaksanakan. Termasuk juga penyusunan, persiapan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD di semua daerah; kemudian juga
11. Telah ditetapkan atau diterbitkan bersama-sama dengan DPR tentunya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tanggal 25 April 2024; kemudian juga
12. Gelar pasukan rapat koordinasi nasional Satpol PP dan juga kegiatan-kegiatan lain untuk membantu masalah kebencanaan seperti di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam; selanjutnya juga
13. Penyelesaian batas-batas wilayah termasuk batas desa sebanyak 30 desa; dan
14. Penguatan strategi kebijakan dalam negeri berbasis karakteristik lokal pada empat daerah otonomi baru di Papua yang juga sudah langsung diawasi dan didatangi oleh yang kami muliakan tim dari Komisi II DPR RI.

Selanjutnya, untuk tahun 2025.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami muliakan,**

RKP tahun 2025, Pemerintah dalam rancangan RKP menetapkan tema: "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Berdasarkan tema ini, maka telah ditetapkan sasaran pembangunan:

- Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3 sampai dengan 5,6%;
- Tingkat pengangguran terbuka target 4,5 sampai 5%;

- Kemiskinan target 7 sampai 8%;
- *Gene ratio* 0,379 sampai 0,382;
- IPM target 0,56 ;kemudian
- Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6%;
- Nilai tukar petani target 113 sampai 115; dan
- Nilai tukar nelayan 104 sampai dengan 105.

Dan kemudian, ada agenda pembangunan RKP 2025 dari Pemerintah, yaitu:

- Transformasi sosial;
- Transformasi ekonomi;
- Transformasi tata kelola;
- Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta
- Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Nah, berdasarkan target-target nasional tersebut, maka Kemendagri juga telah membuat rancangan arah kebijakan di antaranya adalah:

1. Pemantapan demokrasi dan stabilitas politik dalam negeri, hukum, bidang trantibumlinmas, dan pengawasan pemerintah daerah;
2. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah;
3. pemantapan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pengelolaan keuangan daerah dan desa;
4. Penguatan implementasi digitalisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ini adalah program yang menjadi salah satu prioritas yaitu *e-gov* atau *e-government* digitalisasi sistem pemerintahan, SPBE.

5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi dan pemantapan rekomendasi strategi kebijaksanaan pemerintahan dalam negeri.

Arah kebijakannya disusun dan dibagi sesuai dengan unit kerja di Kementerian Dalam Negeri.

Adapun untuk pagu indikatif dan rencana kerja dan, pe, Kemendagri tahun 2024 berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan tanggal 5 April bersama Kemendagri, telah ditetapkan total pagu indikatif Kemendagri tahun 2025 sebesar 4,78 triliun.

Total pagu indikatif Kemendagri 2025 dalam surat bersama tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1,43 triliun dibanding 2024, 3,34 triliun. Terutama, yang bersumber dari pagu pinjaman luar negeri. Komposisinya adalah:

- Belanja sebanyak, operasional sebanyak 1,47 triliun;
- Pegawainya adalah 845 miliar, terutama untuk gaji dan tunjangan kinerja; dan kemudian
- Untuk belanja barang operasional dan pembelian perkantoran sebanyak 628 miliar; sedangkan

- Belanja non operasionalnya sebanyak 3,3 triliun atau lebih kurang hampir 70%.

Sumber pendanaan rupiah murninya 3,21 triliun. Pinjaman luar negeri 1,51 triliun. Kemudian, PNBPN sebanyak 48,35 miliar.

Dari surat bersama ini telah dilaksanakan trilateral *meeting*. Sekali lagi, Kemendagri, Menteri Keuangan, dan Kementerian Bappenas tanggal 2, 3, dan 6 Mei 2024. Dan kemudian disepakati bahwa pagu indikatifnya sebanyak Rp4.784.228.518,00 yang dibagi dalam empat program ini:

- Dukungan manajemen, kemudian
- Pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa;
- Tata kelola kependudukan Dukcapil.

Ini yang mengalami peningkatan, terutama untuk penguatan infrastruktur IT. Karena, nanti NIK akan menjadi *database* yang paling utama untuk program. Jadi, visi misi juga Presiden yang baru, Presiden ilegal, maksud kami, terpilih, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government*.

Kemudian, dibagi berdasarkan eselon-eselon sebagaimana-

Tolong layar berikutnya.

Jadi, yang kita lihat di sini yang tertinggi itu adalah di belanja pegawai. Saya ulangi. Belanja pegawai 845 miliar lebih. Belanja barang operasional 628 miliar lebih. Total 1,4 triliun.

Sedangkan, belanja non operasionalnya yang tertinggi adalah Dukcapil, yang tadi kami sampaikan, adalah pinjaman dari World Bank itu untuk memperkuat infrastruktur IT. Infrastruktur IT ini menjadi kunci, sekali lagi, untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya. Digitalisasi pemerintahan menjadi program unggulan dan perlu penguatan. Baik *storagenya* kemampuan menyimpan, dan *backupnya*, serta *bandwidth* atau untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi *lebot* misalnya, lamban, serta memperkuat sistem *security*.

Karena, juga ada undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah ada yang akan efektif berlaku bulan Oktober. Sehingga, pemerintah harus betul-betul bisa menjaga data-data pribadi otomatis penguatan *cyber security* data Dukcapil sangat diperlukan sekali.

Kemudian, berdasarkan hasil trilateral *meeting* tanggal 2, 3, dan 6 Mei, terdapat kegiatan Kemendagri mendukung pencamatan lima agenda pembangunan nasional, sebanyak 102 kegiatan tersebar di 9 komponen. Totalnya sebesar 429 miliar lebih.

Adapun rincian kegiatan untuk 2025 mendukung agenda pembangunan nasional di antaranya adalah:

1. Transformasi sosial yang meliputi lembaga Posyandu target 1.500 lembaga oleh Ditjen Bina Pemdes; kemudian

2. Daerah yang difasilitasi dengan penerapan standar pelayanan minimum. Terutama, hal yang krusial masalah pendidikan, kesehatan, dan sosial. Target 546 daerah oleh Dirjen Bina Bangsa; kemudian juga
3. Penguatan IT tadi yang berbasis NIK, ini di 1300 lembaga pada lembaga yang berafiliasi pada Dirjen Dukcapil.

Kemudian, dua transformasi ekonomi antara lain adalah:

1. Indeks, penguatan indeks maturasi perkotaan lintas K/L di wilayah metropolitan. 10 daerah oleh Ditjen Bina Adwil;
2. Pelatihan aparat desa dan pengurus lembaga kabupaten desa, target tiga ribu enam ra. 3.060 desa oleh Dirjen Bina Pemdes. Ini di juga dibiayai oleh World Bank; kemudian
3. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi pemerintahan dalam negeri. Target 546 daerah, ini inovasi oleh Badan BSKDN.

Kemudian, untuk target pemerintah yang lain adalah transformasi tata kelola:

1. Bantuan keuangan partai politik, target 8 lembaga oleh Polpum kemudian
2. Daerah memiliki angka indeks gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Targetnya kategori sangat baik di 17, dengan target 17. Rekomendasi oleh, *leading-nya* adalah Ditjen Bina Adwil; kemudian
3. Penyelesaian sengketa di daerah-daerah otonomi baru dengan target 4 rekomendasi oleh Ditjen Otonomi Daerah; dan juga
4. Penguatan atau pemberian materi orientasi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan target 1900, 1092 oleh BPSDM.

Untuk agenda pembangunan yang nasional: supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, beberapa kegiatan dilaksanakan Kemendagri, antara lain:

1. Penguatan demokrasi di 19 daerah oleh Dirjen Polpum; kemudian
2. Penguatan tim pengendali inflasi daerah untuk pengendalian inflasi ini. 38 daerah provinsi itu oleh Ditjen Bina Bangsa; kemudian
3. Daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi untuk meningkatkan PAD di 300 daerah oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Agenda terakhir yang menjadi prioritas pemerintah, ketahanan sosial budaya. Maka, kami menerjemahkan dalam kegiatan atau kebijakan:

1. Daerah yang menerapkan standar pelayanan minimum, khususnya sub urusan bencana dan kebakaran 546 daerah oleh Dirjen Bina Adwil; kemudian
2. Daerah yang difasilitasi penerapan SPM untuk urusan pekerjaan umum dan trantibumlinmas. Target 50, 546 daerah juga oleh Dirjen Bina Bangsa;
3. Penerbitan akta kelahiran. Target 550.000 akta, oleh Dirjen Dukcapil.

Sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, kami sudah menyampaikan tadi. Kami langsung saja, mungkin ke BNPP.

Khusus untuk BNPP, sebagai Kepala BNPP, beberapa prestasi yang telah diterima di antaranya dari:

- BPK, saya ulangi, dari BPK juga sebanyak sembilan kali berturut-turut "Wajar Tanpa Pengecualian"; dan kemudian
- Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum juga mendapatkan penghargaan dari Kemkumham, 5 terbaik; kemudian
- Dari ANRI, ini arsip kategorinya "Memuaskan";
- Penghargaan kepada 3 pos lintas batas negara yang dikelola, kategorinya adalah nilai "A" atau "sangat baik" dari Kemenpan-RB;
- Tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah SPIP level 3 atau kategori terdefinisi oleh BPKP; kemudian juga
- Dari Kementerian Bappenas mendapatkan nilai 99,89 dengan predikat "Sangat Baik" dalam konteks penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; dan kemudian juga
- Dari ada, Kementerian Keuangan tentang aplikasi Smart yang diterapkan BNPP predikat sangat baik, 95,11; selanjutnya untuk
- Dari Kementerian Keuangan tentang indikator kinerja, pelaksanaan anggaran memperoleh nilai sangat baik 94,79.

Dan juga dari Kementerian Keuangan juga, dalam konteks belanja:

- 6, peringkat ke-6 dari 47 lembaga pagu kecil;
- 8 dari 84 Kementerian Lembaga, dengan realisasi 99,41%.

Kemudian untuk realisasi di tahun 2023, dari anggaran 248,50 miliar pagunya ini mengalami perubahan, yaitu ada pengurangan sebanyak lima koma 5,77 miliar. Kemudian, realisasi di tahun 2023 adalah 247,66 miliar.

Antara lain:

- untuk dukungan manajemen anggaran realisasinya 99,38%;
- untuk belanja pegawai 99,23%;
- belanja barang 99,35%,;
- belanja modal 99,96%.

Outputnya, di antaranya adalah:

- Terlaksananya pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik kategori "Baik" dari Kemenpan-RB; kemudian
- Dari KPK, survei penilaian integritas SPI nilai baik, 74,96; kemudian
- Terselenggaranya pencaangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan atau Gerbangdutas di Pulau Meutimiarang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Itulah. Maluku, terselenggara dengan baik;
- Disepakatinya nota kesepahaman BNPP dengan perkumpulan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan UNS Surakarta; juga
- Kerja sama dengan Baznas tentang dukungan pelayanan dasar pengelolaan kawasan perbatasan. Jadi, memanfaatkan Baznas bekerja sama untuk membangun daerah perbatasan menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas);

- Terselenggaranya koordinasi pengendalian dan koordinasi pembangunan perbatasan yang melibatkan semua *stakeholder*, baik pemerintah maupun pusat maupun daerah;
- Bimtek peningkatan kapasitas SDM untuk BNPP di bidang keuangan publikasi dan dokumentasi; juga dilaksanakan
- Sejumlah seminar diskusi dalam rangka penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara kawasan perbatasan.

Kami mungkin tidak menjelaskan secara detail tentang apa yang telah dikerjakan para Kedepatian. Karena, kami lihat cukup panjang di sini, Bapak. Kami langsung saja masuk ke evaluasi pelaksanaan anggaran BNPP tahun 2004 sampai dengan bulan Mei.

Pagu yang ditetapkan saat itu adalah sebesar 232,5 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Belanjanya adalah untuk:

- Operasional 199 miliar;
- Non-operasional 63 miliar;
- Pegawai 38 miliar;
- Belanja barang 189 miliar;
- Belanja modal 4,9 miliar.

Kemudian, sejumlah program prioritas nasional di tahun 2004 yang telah dilaksanakan adalah:

1. Koordinasi perencanaan, perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana di pulau-pulau keluar, terluar yang tidak berpenduduk. Itu ada 49 targetnya; kemudian
2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai bagian untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan. Itu adalah memperkuat aparatur di tingkat desa di terdepan 180 orang; juga
3. Koordinasi, rapat koordinasi besar yang melibatkan semua *stakeholder*, ada satu kegiatan telah dilaksanakan;
4. *Stunting* juga termasuk gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan target 100 orang.

Ini berdasarkan hasil trilateral *meeting* bersama Bappenas, PPN, dan Menteri Keuangan tanggal 4 Maret. Disepakati pergeseran anggaran sebanyak 2,5 miliar menjadi 1,5 miliar.

*Nah*, realisasinya anggaran BNPP adalah sebesar, sampai dengan 31 Mei, 91,55 miliar atau lebih kurang 39,37%. Jadi, realisasinya sampai dengan bulan, tanggal 31 Mei 39,37%. Kami, menurut kami adalah rata-rata nasional 35,93%. Jadi, ini di atas realisasi nasional.

Kemudian, ada sejumlah capaian program prioritas yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Mei. Kami juga sudah sampaikan pada *slide* ya. Di antaranya adalah:

- Pembuatan nota kesepahaman;
- Rapat koordinasi.



Karena, memang Lembaga BNPP ini adalah utama lembaga koordinasi. Operasionalnya terutama pada PLBN yang jumlahnya ada 17:

- 8 sudah operasional diresmikan;
- 5 sudah operasional belum diresmikan;
- 2 sedang dalam tahap proses Pembangunan.

Itulah kira-kira capaian kinerja dan realisasi belanja yang di tahun 2024.

Khusus untuk tahun 2025, kebijakan strategis yang dibuat di BNPP tentu tidak akan keluar dari rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang sama kami sampaikan seperti tadi, maka pagu indikatif yang sudah disepakati dengan Menteri Keuangan Bappenas sebanyak 267,13 miliar. Ini mengalami kenaikan sedikit, yaitu 34 miliar atau lebih kurang 14% dibanding tahun 2024.

267 miliar lebih ini, di antaranya adalah untuk:

- Belanja operasional 182 miliar atau 68%;
- Belanja non operasional 84 miliar atau 31%;
- Pegawai 44,97%, 16%;
- Belanja barang termasuk operasional 77%; dan
- Belanja modal itu hanya 16%.

Dan berdasarkan program, pagu indikatif untuk dukungan manajemennya 87%. Sisanya adalah pagu indikatif untuk program lain sebanyak 12,54%.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir; kemudian
2. Peningkatan sinergitas pengelolaan jalur perlintasan; dan
3. Koordinasi perundingan batas maritim

Di samping program-program yang bersifat reguler.

Kami kira itu Pimpinan, apa, pagu yang sudah disepakati melalui trilateral *meeting*, baik Kemendagri maupun BNPP.

Kami sangat berharap banyak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II dapat mendukung pagu yang kami usulkan dan sudah disepakati dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dan untuk mungkin DKPP, meskipun masih dalam satu komponen, tapi karena kekhasannya kalau mungkin bisa diberikan waktu kepada Kepala Ketua, *eh*, Kepala DKPP untuk juga bisa menjelaskan program dan realisasi belanjanya.

Sekian.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Ya. Terima kasih, Saudara Menteri.

Ini sekaligus dengan BNPP, ya.

Silakan, Ketua DKPP. Kalau masih mau *nambah* Pak, *nambah* anggaran, walaupun sudah ini kan.

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Salam.

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI,  
Para Anggota Komisi II DPR RI yang saya muliakan,  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Prof Dr. Muhammad Tito Karnavian, kemudian  
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta jajarannya,  
Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara yang dalam ini diwakili oleh Plt. Wakil Ketua/Wamen ATR beserta jajaran,**

Kami *haturkan* terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Yang pertama, dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua DPR RI untuk menghadiri undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda pembahasan:

- Pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2024;
- Rencana kerja pemerintah tahun 2025; dan
- Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan seterusnya.

Pada kesempatan ini,

**Bapak/Ibu Pimpinan Komisi II DPR RI,**

DKPP ingin menyampaikan bahwa tahun 2025 DKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp89.271.812.000,00 dengan rincian:

- belanja pegawai 10%;
- belanja barang 10%;
- belanja non-operasional 75%.

Dan anggaran tersebut terbagi dalam tiga klasifikasi rincian *output*, yakni untuk:

- Pelayanan publik 22%. Pelayanan; pelayanan publik kepada Lembaga, saya ulang. layanan publik kepada lembaga 2,4%;
- Pelayanan publik lainnya sebesar 55%; dan
- Layanan dukungan manajemen internal sebesar 41%.

Saya kira mohon izin saya tidak akan membacakan semuanya. Rincian berikutnya ada di *slide*.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu Pimpinan Komisi II DPR RI, Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah mendukung kenaikan anggaran DKPP di tahun anggaran 2025 meningkat sebesar 132%.

### **Bapak/Ibu Pimpinan Komisi II DPR RI,**

Pada tahun 2023, DKPP mendapatkan anggaran sekitar 28 miliar. Tentu saja pada waktu sangat jauh dari cukup. Sehingga berkat dukungan Bapak/Ibu Pimpinan, DKPP mendapatkan tambahan anggaran hampir 200% lebih. Sehingga, anggaran tahun 2023 mencapai 99 miliar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Bapak Menteri Dalam Negeri, juga dukungan dari para Pimpinan Komisi II serta Anggota Komisi II. Dari 91 miliar itu, penyerapannya mencapai 93%.

Dari realisasi anggaran tersebut, DKPP telah mencapai kinerja yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang dilakukan, di antaranya DKPP melakukan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU serta Ketua dan anggota KPU, eh, Bawaslu RI di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Pada kesempatan itu, terima kasih Bapak Presiden sudah berkenan membuka Rakornas. Rakornas tersebut tentu saja diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme juga menguatkan integritas para penyelenggara Pemilu. Itu harapan kita semua. Sehingga, Pemilu yang *alhamdulillah* sudah berlangsung pada tanggal 14 Februari berlangsung dengan tertib dan aman. Dan harus kita akui ini adalah salah satu kerja dari para penyelenggara Pemilu. Meskipun di sana sini masih dilaporkan kekurangan, kita syukuri semuanya Pemilu berjalan dengan lancar.

Dalam kesempatan ini ingin saya laporkan pula, ada beberapa hal yang telah dicapai oleh DKPP. Yang paling penting bagi kami adalah saat ini DKPP sudah menempati kantor baru yang jauh lebih layak untuk kantor. Karena, kantor lama itu cuma memuat, halaman parkirnya memuat parkir delapan mobil. Sekarang ini jauh lebih layak, jauh lebih bagus.

Terima kasih Pak Menteri, sudah menyediakan kantor DKPP yang lebih bagus juga. Tempatnya lebih strategis. Sehingga, kami bisa bekerja nyaman di tengah-tengah tumpukan perkara-pengaduan-pelanggaran-etik. Meskipun kantor ini sementara karena masih meminjam dari BRI. Per dua tahun harus

kita diperpanjang. Harapan, tahun depan bisa diperpanjang lagi sebelum kita bersama-sama pindah ke IKN.

Selain itu, DKPP juga:

- Telah menerbitkan naskah tata dinas;
- Telah melakukan inovasi dalam penerimaan pengaduan melalui aplikasi SiETIK. Namanya SiETIK. Bukan Si ETI, ya. SiETIK; juga
- Sistem IT DKPP sudah membentuk CSIRT, agar pengamanan data DKPP lebih terjaga; juga
- Melakukan pengembangan jejaring dokumentasi dan informasi hukum JDIH;
- Dalam rangka memberikan pelayanan publik, sudah kita buka *call center* pengaduan lewat nomor telepon 15101. Mungkin karena itu, pengaduan dugaan pelanggaran etik ke DKPP makin hari makin besar;
- Dalam hal melaksanakan tata kelola administrasi yang baik, kami juga sudah melakukan basis surat-menyurat dengan aplikasi Srikandi. Sehingga, tidak perlu tanda tangan capai-capai.

Selama tahun 2023, jumlah perkara yang ditangani DKPP mencapai 325. Artinya, selama 20, 2023 itu setiap hari, hampir satu pengaduan. Sangat, masih sangat besar. Sementara, unsur-unsur penyelenggara Pemilu yang diadakan selama tahun 2023, yakni:

- Anggota KPU kabupaten/kota, itu sebanyak 293 radu;
- Panwas kabupaten/kota, 60 orang teradu;
- KPU RI diadakan 32 pengaduan;
- Bawaslu RI, 30. Enggak beda jauh antara 32 dan 30 pengaduan; kemudian
- KPU Provinsi, 19 pengaduan,
- Panwas Kecamatan 18;
- PPK 13;
- Panitia pemilih Kecamatan 13;
- PPS itu di tingkat paling bawah 4.

Karena untuk penanganan perkara pelanggaran etik di tingkat PPK dan PPS ditangani, kita serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga, DKPP tidak menangani langsung. Kecuali, bila pengaduan itu berkaitan dengan penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota, baru DKPP ikut menangani.

Dari sebanyak itu sepanjang tahun 2023, kita menyidangkan, melakukan persidangan sebanyak 145 persidangan. Dengan total yang diputus dugaan pelanggaran etik itu sebanyak 497 penyelenggara Pemilu yang diberi sanksi oleh DKPP. Jumlahnya sangat besar dan ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua.

Untuk menurunkan angka pelanggaran etik para penyelenggara Pemilu, tentu saja kami di DKPP sangat berharap ke depan ada regulasi-regulasi yang lebih bagus lagi. Sehingga, pelanggaran etik di lingkungan penyelenggara Pemilu semakin berkurang, baik kuantitas maupun kualitasnya.

**Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI,**

Selanjutnya, kami laporkan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 sampai dengan bulan Mei. Tahun 2024, DKPP mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp67.532.578.000,00, dengan komposisi jenis belanja sebagai berikut:

- satu, belanja pegawai sebesar 11%;
- belanja barang 78%; dan
- belanja modal 79%.

Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebanyak empat puluh persen koma, 40,41%. Yakni, sebesar 27 miliar sekian. Terdiri dari:

- untuk belanja pegawai sebesar 48%;
- belanja barang 33%; dan
- belanja modal 78%.

Dari realisasi anggaran tersebut telah dicapai beberapa hal kinerja, sebagai berikut. Selama tahun 2024 atau lima bulan terakhir, jumlah pengaduan yang masuk DKPP yang ditangani DKPP itu sebanyak 300 pengaduan dan yang sudah disidangkan sebanyak 108. Jumlahnya sangat besar.

Selain , DKPP juga bersyukur, ya. Tahun ini secara kelembagaan, yang dulunya Perpres DKPP itu jadi satu dengan Bawaslu, tahun ini Presiden sudah memisahkan Perpres DKPP tersendiri. Tidak lagi menjadi satu dengan Bawaslu. Yang itu pantas kita syukuri karena dengan demikian bisa menunjang kinerja DKPP yang jauh lebih bagus.

Saya akan lanjut karena sudah dibisiki agar lebih dipercepat.

---

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sebentar, Pak Ketua DKPP.

Saya perpanjang sampai jam, jam 14.00 ya kita perpanjang. Habis ini OIKN, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

**Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI,**

Pada kesempatan ini, kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2024, 2024 Bapak. sebesar Rp24.482.304.269,00. Tambahan anggaran tersebut akan kami pakai untuk:

1. Satu, pelaksanaan forum diseminasi pemahaman kode etik penyelenggara Pemilu di empat wilayah:

- wilayah I di Sumatera Utara;
- wilayah III di Jawa Tengah, saya ulangi, wilayah II di Jawa Tengah;
- wilayah III di Kalimantan Selatan; dan
- wilayah IV di Sulawesi Selatan.

Juga, untuk-

2. Simposium nasional dalam rangka pemahaman kode etik penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan dalam rangka penguatan penyelenggara Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024. Nilainya sebesar 3 miliar sekian; juga
3. Dukungan untuk sistem informasi tim pemeriksa daerah sebesar 1,15 miliar.

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Kiranya, dapat menjadi bahan informasi diskusi. Serta, mohon dukungan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi II untuk tambahan anggaran tahun 2024.

Terima kasih. Akhiri dengan salam.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

*Walaikumsalam.*

Pak Ketua DKPP, tadi 24 miliar? Tambahannya 24? 24? Tadi 22, Pak?

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Izin.

22.482.304.269,00. 22 miliar.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Bukan 24 Pak, ya?

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Bukan. 22.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Terima kasih.

Silakan, Pak Sekjen, *eh*, Pak Sekjen lagi. Pak Kepala Otorita IKN.

**Plt. WAKIL KEPALA OIKN (RAJA JULI ANTONI, M.A., Ph.D):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua,

*Om swastiastu,*

*Namo budhaya,*

Salam Kebajikan,

Salam sehat dan,

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi II, Pak Junimart Girsang, Pak Saan Mustofa, dan Pak Syamsurizal, serta Seluruh Anggota Komisi II yang saya hormati, Yang juga saya hormati Bapak Mendagri Prof Muhammad Tito Karnavian, Bapak Ketua DKPP, Pak Hedi Lugito, Mas Kris dan Teman-teman semua yang berbahagia,**

Hari Senin minggu lalu, Bapak Dr. Ir. H Mochamad Basuki Hadimoeljono M.Sc. dan saya Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D. diminta menghadap ke Istana Merdeka oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami diberi banyak arahan sekaligus Keppres penunjukan kami sebagai Plt. Kepala dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Hari ini, seminggu kemudian, kami merasa terhormat mendapat undangan dari Komisi II DPR RI untuk menghadiri forum yang mulia ini.

Selanjutnya, saya minta, saya diminta oleh Pak Plt Ketua untuk menyampaikan salam hormat kepada Bapak/Ibu sekalian disertai permohonan maaf bahwa hari ini beliau tidak bisa hadir karena pada saat bersamaan beliau sedang ada penugasan lain dari Bapak Presiden dalam kapasitas beliau sebagai Menteri PUPR. Dan sebagai Wakil Ketua OIKN, Plt, Plt Ketua, Plt. Wakil Ketua, saya diminta untuk mewakili beliau untuk menghadiri acara yang terhormat ini.

**Pak Pimpinan,**

Sejatinya, kami akan melaporkan secara komprehensif empat hal, ya:

- tahap progres pembangunan Ibukota Nusantara;
- rencana kerja;
- evaluasi tahunan; dan
- evaluasi tahun 2024.

Namun karena tadi sesuai dengan perintah Pimpinan, kita akan fokus kepada pagu anggaran indikatif 2025. Namun demikian, tentu kalau nanti pada forum tanya jawab Bapak/Ibu sekalian ingin masuk ke hal yang lebih *substansis*

tentang progres OIKN ini, pembangunan IKN ini, tentu dengan senang hati kami akan mencoba merespons sebaik mungkin.

Pada tahun 2023 dan 2024, OIKN mengelola dua program utama, yaitu program dukungan manajemen dan program pengembangan kawasan strategis.

Pada tahun 2023, anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar seribu, sebesar 194,74 triliun. Dan untuk program pengembangan kawasan strategis miliar, *sorry*, dan untuk program pengembangan kawasan strategis sebesar 91,16 miliar. Jadi, total sebesar 285,9 miliar.

Pada tahun 2004, anggaran meningkat menjadi 340,47 miliar:

- untuk dukungan manajemen sebesar 202,8 miliar; dan
- untuk pengembangan kawasan strategis, *sorry*, 202,88 Miliar untuk pengembangan kawasan strategis.

Sehingga, totalnya menjadi 543,36 miliar rupiah.

Untuk tahun 2025, pagu indikatif turun menjadi 505,53 miliar, dengan rincian:

- 368,44 Miliar untuk dukungan manajemen; dan
- 137,09 Miliar untuk pengembangan kawasan strategis.

Detail masing-masing eselon I dapat Bapak/Ibu lihat pada *slide* yang ditampilkan di depan.

Selanjutnya realisasi DIPA OIKN tahun anggaran 2023, tercatat sebesar 271,7 miliar atau 95,04% dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi DIPA OIKN Tahun Anggaran 2024, hingga 8 Juni 2024, mencapai 177,6 miliar atau 32,69%. Dan kami menargetkan capaian serapan anggaran OIKN sampai dengan akhir Juni sebesar 45%.

### **Bapak/Ibu Pimpinan Anggota Komisi II yang saya hormati,**

Saat awal terbentuknya OIKN, pembiayaan kegiatan OIKN Tahun 2022 dibebankan kepada DIPA Sekretaris, Sekretariat Negara. Kemudian pada tahun anggaran 2023, OIKN mendapatkan pagu anggaran pertama sebesar 285,9 miliar. Pada tahun 2024, pagu anggaran OIKN mengalami peningkatan anggaran sebesar 90%. Dibanding tahun 2023 menjadi 543,3 miliar rupiah.

Namun, pada pagu indikatif 2025, terdapat penurunan sebesar 7%. Sehingga, pagu anggaran kami menjadi, pagu indikatif anggaran kami menjadi Rp505,55 miliar.

Pagu indikatif anggaran OIKN pada tahun 2025 yang mengalami penurunan disebabkan bahwa rancangan anggaran masih berupa *baseline* yang berasal dari kebutuhan dan realisasi berdasarkan pagu anggaran tahun 2023-2024. Saat ini, kami sedang mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Upaya ini kami, kami laksanakan dengan terus



melaksanakan program dengan terukur dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan program.

**Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Pada tanggal 5 April 2024, pagu indikatif OIKN untuk tahun 2025, seperti yang dikatakan tadi, berjumlah lima, Rp505,5 miliar. Kemudian, pada tanggal 17 hingga 22 Mei yang lalu, kami mengadakan pertemuan tiga pihak antara OIKN, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk membahas Rencana Kerja 2025 berdasarkan pagu indikatif tersebut. Pertemuan ini berhasil menghasilkan kesepakatan tentang distribusi pagu indikatif per unit eselon I.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2024 kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk anggaran 2025. Dalam pertemuan tiga pihak tersebut, kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar 29,8 triliun. Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN serta melanjutkan pembangunan dalam ekosistem kota yang baik di IKN, tentunya.

Pada pertemuan tiga pihak trilateral *meeting* antara OIKN, Kemenkeu, dan Bappenas telah disepakati distribusi pagu indikatif per unit eselon 1. Perlu dicatat bahwa sebagian besar unit kami mengalami penurunan anggaran dibanding 2024, kecuali Sekretariat Deputy Bidang Pendanaan dan Investasi serta Deputy Bidang Sarana dan Prasarana yang mengalami peningkatan alokasi.

OIKN mampu, OIKN mengampu dua program utama dengan persentase pengalokasian:

- sebanyak 72,9% dari pagu indikatif dialokasikan untuk program dukungan manajemen; sementara
- sisanya sebesar 27,1% digunakan untuk program pengembangan kawasan strategis.

Alokasi pada kedua program ini tersebar ke dalam tujuh grup klasifikasi rincian *output* KRO, yaitu grup A, B, E, F, P, Q, dan R. Pagu indikatif tahun 2025 sebesar 505,5 miliar tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan menghasilkan 126 rincian *output* yang tersebar pada masing-masing unit eselon I. Selain itu, prioritas nasional pagu pada pagu indikatif tahun 2025 ditetapkan sebesar 96,7 miliar atau 19% dari total pagu. Alokasi prioritas nasional ini tersebar dalam grup KRO, P, Q, dan R.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai program. Maaf, saya kira ini juga kita *skip*, bisa kita *skip*.

Dan terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang diberikan untuk mewujudkan visi besar Ibukota Nusantara.

Kami atas nama Otorita Ibukota Nusantara, sangat mengapresiasi masukan, kerja sama yang telah terjalin dengan Komisi II DPR RI secara baik selama ini. Bersama-sama kita akan mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Apresiasi juga kami ucapkan sebesar-besarnya pada jajaran teman-teman di Kementerian lain: Kementerian PUPR, ATR/BPN, KLHK, serta K/L lain yang telah bekerja keras sehingga capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara telah terlaksana sesuai dengan harapan sampai hari ini.

Demikian dari saya.

*Billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

*Walaikumussalam.*

Terima kasih, Saudara Plt. Wakil Kepala Otorita IKN.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Kita masuk ke acara tanya jawab. Dan dari meja Pimpinan kita mau tanyakan yang mau bertanya pendalaman ada?

Saya daftar dulu, Pak. Kita daftar dulu Pak.

Pak Syamsurizal? *Wah*, ini semua bertanya.

Karena begini Bapak/Ibu, kalau memang semua bertanya, kita *break* saja dulu, Pak. Iya kan? Soalnya Pak, Pak Tomsu sudah kasih kode ke saya. Setuju ya, kita *break* dulu? Karena ini semua Anggota bertanya.

Pak Syamsurizal?

Padahal, mestinya ini enggak perlu ditanya. Iya kan? Tapi, enggak apa-apa. Anggota itu, Pak. Nanti saya dimarah-marahin Pak, kalau saya enggak kasih waktu untuk itu.

Kita *break* sampai jam, jam berapa Bu Rezka?

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Jam 14.00.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Jam 14.00. Kalau di IPDN itu, makan 15 menit memang siswanya.

Ya. 30 menit, ya?

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Ya. Sampai 14, 14.30 kita masuk kembali, Pak Sekjen. Setuju ya?

Bu Rezka? Saya takut sama beliau ini Pak, suka marah-marah.

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Iya, Pimpinan. Mungkin terkait dengan rapat pendahuluan anggaran ini enggak perlu banyak-banyak, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

*Nah*, itu tadi kalau kita sepakat, tidak perlu bertanya. Saya baca kesimpulan *nih*. Nanti pendalaman

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Langsung saja, kalau menurut saya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Nanti, kita pembahasan pagu anggaran, pagu sementara, *next* berikutnya. Kan kita masih ada rapat. Betul. Setuju enggak?

**(RAPAT: SETUJU)**

Iya. Begitu, Pak.

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

*Nah*, setuju kan, Pimpinan?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Setuju, ya?

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Setuju *toh*?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Setuju? Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Jadi untuk pendalaman, bukan tidak dapat, nanti pada rapat pembahasan ya, Saudari Menteri? Iya kan, Pak Rektor sudah langsung begini-begitu sama saya, Pak.

Baik. Karena tidak ada pertanyaan pendalaman dari Pimpinan/Anggota, kita langsung masuk pada kesimpulan. Nanti sama-sama kita koreksi Pak, ya.

**Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Badan Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Otorita Ibukota Nusantara**

Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024.

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:

a. Kemendagri

- Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp4.265.153.052.424,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp4.385.969.126.000,00 atau sebesar 97.25%.  
Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi dengan anggaran DKPP sebesar Rp84.563.725.816,00 dari pagu alokasi anggaran DKPP tahun 2023 sebesar Rp91.686.384.000,00 atau sebesar 92.23%;

Setuju Pak, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- Realisasi APBN tahun 2024 per 31 Mei 2024 sebesar Rp1.339.940.821.014,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp3.960.309.192.000,00 atau sebesar 33.83%.

Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran DKPP sebesar Rp27.290.070.314,00 dari pagu alokasi anggaran DKPP tahun 2024 sebesar Rp67.532.578.000,00 atau sebesar 40.41%;

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

- Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp4.784.228.518.000,00 sudah termasuk pagu indikatif DKPP tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000,00.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

b. BNPP

- Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp246.205.261.906,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp247.666.124.000,00 atau sebesar 99.41%;
- Realisasi APBN tahun 2024 per 31 Mei 2024 sebesar Rp91.557.760.648,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp232.574.309.000,00 atau sebesar 39.37%.

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Ditanya dulu, Pimpinan.

---

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sudah saya tanya, Bu. Titik berikutnya,

- Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000,00.

Setuju?

Ah, kan saya tanya ini. Ya, Bu Rezka, saya sudah tanya ini.

**(RAPAT: SETUJU)**

Iya.

c. Menyangkut OIKN

- Realisasi APBN tahun 2023 sebesar 271 milyar 719 juta dua ra, 19 juta dua, 19 juta dua,

---

Kok dua seratus ini.

- Rp271.719.143.190,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp285.909.376.000,00 atau sebesar 95.4%.

Setuju ya, IKN?

Ya? Yang mana? 285 miliar 909 juta. 909 juta 376 ribu rupiah. Benar, Pak.

Yang atas? Oh, sudah diperbaiki. Seratus, ya.

Saya ulangi,

- Realisasi APBN tahun 2024 per 8 Juni 2024 sebesar Rp177.634.274.589,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp543.366.166.000,00 atau sebesar 32.69%.

Setuju ya, IKN?

**(RAPAT: SETUJU)**

- Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp505.534.826.000,00.

Cocok, ya? Bu Rezka cocok?

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diusulkan oleh DKPP dan OIKN sebagai berikut:

- Usulan tambahan anggaran tahun 2025 DKPP sebesar 22 miliar,

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Izin koreksi, Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Iya.

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

2024, sebetulnya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

2024?

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Iya, anggaran 2024. Tambahan tahun ini. *Nggih.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Iya?

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Tambahnya kan tahun ini bukan tahun.

Untuk tahun ini. DKPP untuk tahun ini, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sudah ada Pak, pagu indikatif.

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Pagu indikatifnya beda. Ini kan usulan tambahan anggaran untuk tahun ini dua ribu, dua ribu-

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Bukan tahun 2025, Pak? Seperti IKN. IKN kan 2025, Pak?

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Kami 2024, Bapak. Kalau 2025, pagu indikatifnya sudah sesuai.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sebentar, Pak. Kita tanya ahlinya, Pak. Kita telepon Banggar dulu.

Itu kita pending Pak ya, menunggu jawaban dari Banggar.

Titik yang kedua,

- Usulan tambahan anggaran tahun 2025

Ya?

- OIKN sebesar 29 triliun-

Ini triliun Pak, ya. Kalau, kalau DKPP kan miliar Pak, ini triliun. *Nah,* itu Pak.

- Rp29.864.642.157.000,00.

Begitu Pak, ya? Untuk OIKN kita ketok.

**(RAPAT: SETUJU)**

Tinggal menunggu DKPP.

**ANGGOTA RAPAT:**

Izin. Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Iya, saya tanya teman Komisi II, apakah setuju mengenai ini Pak, untuk 2024. Karena kita akan ajukan ke Pemerintah ke Kementerian Keuangan. Nanti, tergantung di sana Pak.

Teman-Teman Komisi II, apa kita setuju penambahan untuk 2024?

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Ketua, izin Ketua.

Sebelah kanan, Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Iya, Pak Amin.

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Terima kasih, Ketua.

Terkait dengan usulan OIKN ini, tentu kita ingin dalam dulu sejauh mana.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Ini OIKN, Pak.

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**



Sudah kita ketok tadi, Pak.

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Bagaimana?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sudah diketok tadi, OIKN.

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Belum.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sudah, Pak. Saya ketok tadi.

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Usulan tambahannya dulu, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sudah saya ketok.

Yang DKPP, Pak. DKPP Pak, yang 2024.

Ini kan, OIKN kan 2025 nanti akan kita bahas di rapat berikutnya, Pak. Untuk tambahan *ini*, ya. *Nah*, itu Pak Amin.

**F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S. E., M.M):**

Oke. Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak.

Saya bertanya kepada Teman-teman Komisi II dan Pimpinan, apakah kita setuju penambahan untuk 2024?

**F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Silakan, Pak Gubernur.

**F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Amin.

Saya pikir ini kan usulan Pak, dan belum kita ketok angkanya. Tapi, setuju atau tidak setuju untuk dibahas nantinya. Jadi saya pikir, ya kita setuju saja untuk mem bahas nya. Sambil nanti sambil jalan kita koordinasikan juga dengan Banggar dan yang terkait lainnya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Baik, setuju ya?

Ya, Pak Presiden Dayak sedunia. Silakan, Pak.

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Terima kasih.

Mengenai usulan DKPP tahun 2024 sah-sah saja. Nanti kita akan sampaikan ke Banggar. Namun, apa negara punya duit atau tidak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Baik.

Setuju, ya?

**KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):**

Itu cuma 22 miliar, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Maksudnya kalau, kalau IKN 29 triliun?

Ada Bu Rezka? Silakan, Bu.

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Pimpinan, kita masukkan saja. Nanti tinggal kita tindak lanjuti termasuk di bagian Banggar. Jadi, saya setuju saja. Apalagi, DKPP butuh *support* juga ini biar enggak keras terakhir, keras terakhir.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Banyak sidang-sidangnya ya?

**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):**

Betul.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Saya ulangi. Usulan tambahan anggaran tahun 2024 dan 2025. OIKN, ya.

- Usulan tambahan anggaran tahun 2024 DKPP sebesar

22 miliar Pak, ya?

- Rp22.482.304.269,00.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

---

Maka, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang akan datang.

Yang ketiga,

3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, BNPP, DKPP dan OIKN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023

Pak, satuan tiga.

3. dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya, sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan

Ya, satuan tiga

3. serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN pada tahun 2025 yang akan datang, paling lambat 2 minggu terhitung sejak hari ini.

Setuju Pak Menteri, ya?

Silakan, Pak.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.):**

Prinsip kita akan siapkan. Namun, apakah mungkin itu didetailkan sampai dengan satuan tiga? Karena, karena, karena kalau saya tidak salah, kita ada Keputusan MK yang menyatakan bahwa tidak sampai ke satuan tiga.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Ya, itu permintaan Komisi II, Pak Menteri.

Silakan mau dipenuhi *monggo*, tidak juga *monggo*, Pak.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.):**

*Oke.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Itu saja, Pak. Kan tidak harus, Pak.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.):**

Kita akan serahkan semampu sesuai dalam koridor hukum.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Iya kita akan meminta Pak, tidak mengharuskan. Begitu.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.):**

Baik. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Ya.

Setuju Pak, ya?

**F-P.PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si.):**

Ketua, usul saja.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Ya, silakan.

**F-P.PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si.):**

Gambaran ke depan ini kan begini. Putaran Pilpres ke-2 kan enggak digunakan. Saya enggak tahu jadi SILPA atau memang belum, anggarannya belum muncul, ya.

*Nah*, saya sepakat dengan Bu Rezka tadi. Salah satunya untuk membereskan semua permasalahan itu, tambahkan ke DKPP. Kemudian juga, untuk mengantisipasi Pilkada ya, serentak November ini, tambahkan di Kementerian Dalam Negeri, kalau itu bisa.

*Nah*, ini menjadi, menjadi, apa namanya, tugas bagi para Banggar yang dari Komisi II untuk, apa namanya, mengalokasikan itu. Itu saya pikir haknya Komisi II untuk diberikan kepada Mitra Komisi II, menurut saya begitu.

Terima kasih, Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak Toha.

Hak ya Pak, ya. Bukan kewajiban, ya.

Baik. Terima kasih, Pak Toha.

Silakan yang paling terakhir, Pak Syamsurizal.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan rapat.

Sebelum kita akhiri pertemuan tahap ini, saya ingin menyampaikan pemikiran saja, khususnya untuk Kementerian Dalam Negeri. Karena, pada tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan Pilkada di seluruh tanah air. Dan akan dipilih sebanyak:

- 552 kepala daerah;
- 38 gubernur;
- 416 bupati; dan

- 98 wali kota.

Pada saat kita menyusun anggaran untuk tahun 2025, hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan daerah tingkat II atau kita sebut dengan kabupaten/kota dan daerah-daerah otonomi lainnya. Saya kira, perlu sekali kita memberikan perhatian.

Oleh karena itu, karena nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana format daerah tingkat dua yang tahun 2025. Ada kemungkinan kita akan membuka peluang untuk membuka kembali dan menutup moratorium, menghentikan moratorium untuk pengembangan wilayah-wilayah.

Barangkali dalam kaitan dengan itu, perlu dari sekarang Kementerian Dalam Negeri untuk kira-kira menyiapkan anggaran tahun 2025 dengan angka yang lebih besar lagi.

Kami, Komisi II, saya sendiri berpikir perlu kita dukung untuk meningkatkan semacam legalitas, atau apa namanya, untuk daerah kabupaten/kota se-Indonesia agar mereka lebih, lebih lincah bergerak dalam pengembangan daerahnya.

Khususnya, tadi saya lihat dalam *slide* dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri juga menggambarkan bagaimana ke depan Pemerintah kita ini memperhatikan daerah tingkat II. Soal kemampuan berotonominya dan pengawasan daerah, sekaligus. Agar NKRI kita semakin, jadi semakin kokoh.

Jadi, saran kami sekali lagi. Mohon memberikan perhatian anggaran yang agak lebih besar untuk peningkatan kualitas kerja pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Karena, kepala-kepala daerahnya baru saja terpilih saat itu. Syukur, kalau yang mereka itu adalah orang yang sudah *petahana* dan menang. Tapi, kalau mereka jadi, kepala daerahnya adalah kepala daerah baru, barangkali kita melakukan dan perlu melakukan semacam pembinaan. Sehingga, Pemerintah Indonesia ke depan itu, khususnya yang didukung oleh pemerintah kabupaten/kota, betul menjadi kuat dan menyatu khususnya yang berkaitan dengan NKRI.

Banyak hal yang perlu kita kaitkan dengan pemerintah daerah yang baru pada tahun 2025, yang baru selesai melaksanakan Pilkada.

Saya kira demikian. Pak Ketua. Pak Menteri, ini khususnya kami sampaikan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

*Waalaiikumussalam.*

Terima kasih Pak Syamsurizal.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Dengan dibacakannya kesimpulan-

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Pimpinan. Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Sebentar, Pak. Nanti interupsi, Pak.

Pada siang hari ini sebelum saya bawa dalam doa, silakan Pak Hendro.

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Ya. Sedikit saja, Pimpinan.

Jadi, yang pertama. Kita menerima usulan yang ada itu untuk dibahas lebih dalam. Hanya saya mengingatkan kaitannya dengan, apa, rancangan anggaran 2025 perlu diperhatikan. Karena apa?

Dari 2024 kan kita mendapat kenyataan dalam proses demokrasi. Indeks demokrasi kan jatuh betul itu. Ini pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Supaya apa? Di dalam, apa, menyusun anggaran dan program-program kerja ini juga tentunya beda dengan yang kemarin-kemarin. Itu saya harapkan begitu.

Terutama, umpamanya di indeks demokrasi dengan Polpum dan juga masalah pemerintahan. Kaitannya dengan, apa, penyediaan persiapan dari penggerak awal dari birokrasi sekolah IPDN itu juga perlu melakukan terobosan. Kalau perlu, anggarannya juga ditambah supaya lebih baik. Ini menjadi lokomotif utama perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Terima kasih, Pak Endro.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Dari meja Pimpinan, dan Anggota mengucapkan terima kasih kepada saudara Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Plt. Wakil Kepala OIKN beserta jajarannya.

Akhirnya, kita akhiri rapat ini.

Salam sehat kepada semua,

*Billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.17 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.**  
**197504202002122002**